



## AKUNTABILITAS PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA DALAM PEMANFAATAN ASET

**Viona Audelia Siregar <sup>a\*</sup>, Dara Aisyah <sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Administrasi Publik; [vionasrg05@gmail.com](mailto:vionasrg05@gmail.com), Universitas Sumatera Utara; Jl. Tri Dharma No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan

<sup>b</sup> Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Administrasi Publik; [daisyah181169@gmail.com](mailto:daisyah181169@gmail.com), Universitas Sumatera Utara; Jl. Tri Dharma No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan

\* Penulis Korespondensi: Viona Audelia Siregar

### ABSTRACT

*Asset management is a strategic aspect in supporting the performance and sustainability of state-owned enterprises, including PT Kereta Api Indonesia (Persero). PT KAI Regional Division I North Sumatra manages various assets, especially land and buildings, which have high economic and strategic value. However, in practice there are still several problems such as suboptimal asset utilization, limited asset management information systems, and land disputes due to leasing to third parties without accountable procedures. This study aims to analyze the accountability of PT KAI Regional Division I North Sumatra in asset utilization based on good governance principles. The research uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that PT KAI Regional Division I North Sumatra has implemented accountability principles such as compliance with regulations, transparency in reporting, and efficiency and effectiveness in asset utilization. However, improvements are still needed in optimizing asset management systems and strengthening supervision to prevent misuse of assets.*

**Keywords:** *Accountability; Asset Management; Public Administration; PT KAI*

### Abstrak

Pengelolaan aset merupakan aspek strategis dalam menunjang kinerja dan keberlanjutan operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. KAI Divisi Regional I Sumatera Utara mengelola berbagai jenis aset, khususnya tanah dan bangunan, yang memiliki nilai ekonomi dan strategis tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan seperti pemanfaatan aset yang belum optimal, keterbatasan sistem informasi manajemen aset, serta sengketa lahan akibat penyewaan kepada pihak ketiga tanpa prosedur yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas PT. KAI Divisi Regional I Sumatera Utara dalam pemanfaatan aset berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. KAI Divisi Regional I Sumatera Utara telah menerapkan prinsip akuntabilitas seperti kesesuaian terhadap regulasi, transparansi dalam pelaporan, serta efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan aset. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan sistem informasi aset dan pengawasan terhadap penggunaan aset agar pemanfaatannya lebih optimal..

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Pengelolaan Aset; Administrasi Publik; PT. KAI.

### 1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang dimiliki harus

dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa organisasi publik dapat menjalankan fungsinya secara transparan dan bertanggung jawab.

Salah satu BUMN yang memiliki peran strategis dalam sektor transportasi adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Perusahaan ini mengelola berbagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti tanah, bangunan, serta fasilitas penunjang operasional lainnya. Pengelolaan aset tersebut menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset PT. Kereta Api Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemanfaatan aset yang belum optimal, keterbatasan sistem informasi manajemen aset, serta adanya sengketa lahan dengan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset agar dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara dalam pemanfaatan aset.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Good Governance

Konsep *good governance* merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan organisasi publik maupun perusahaan milik negara. Menurut [11], *good governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas publik dalam rangka mencapai pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip *good governance* meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas.

Penerapan *good governance* dalam organisasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### 2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan konsep penting dalam tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik. Menurut [7], akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberi amanah untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memberikan amanah.

Menurut [6] menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab moral, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang relevan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja organisasi sektor publik.

### 2.3 Indikator Akuntabilitas

Menurut [7], akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Kesesuaian dengan Peraturan, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya dan kebijakan organisasi.
- c. Efisiensi dan Efektivitas, yaitu kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat akuntabilitas organisasi, termasuk dalam pengelolaan aset oleh perusahaan milik negara.

### 2.4 Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan proses pengelolaan aset organisasi yang dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penghapusan aset. Menurut [4], manajemen aset bertujuan untuk memastikan bahwa aset organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks perusahaan milik negara seperti PT. KAI, pengelolaan aset yang baik menjadi sangat penting karena aset yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola secara akuntabel.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena akuntabilitas dalam pengelolaan aset pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai yang memiliki peran dalam pengelolaan aset di perusahaan tersebut.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, akuntabilitas dalam pemanfaatan aset pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara dapat dianalisis melalui beberapa indikator. Analisis dilakukan berdasarkan indikator kesesuaian peraturan, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas. dalam pengelolaan aset. Setiap indikator tersebut akan dijelaskan lebih lanjut untuk melihat sejauh mana akuntabilitas telah diterapkan dalam pemanfaatan aset pada organisasi tersebut.

#### **1. Kesesuaian dengan Peraturan**

Kesesuaian dengan peraturan merupakan indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas organisasi. Dalam pengelolaan aset PT. KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, setiap pemanfaatan aset harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik peraturan internal perusahaan maupun regulasi pemerintah terkait pengelolaan aset negara.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan aset di PT. KAI telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama dalam proses pemanfaatan dan penyewaan aset kepada pihak ketiga. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti sengketa lahan dan penggunaan aset yang belum optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pengawasan yang lebih efektif.

#### **2. Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip penting dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan aset serta kebijakan yang diambil oleh organisasi.

Dalam konteks PT. KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, transparansi dilakukan melalui pelaporan dan dokumentasi terkait pemanfaatan aset yang dimiliki perusahaan. Informasi mengenai penggunaan aset serta kerja sama dengan pihak ketiga juga didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Namun demikian, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan aset dapat diketahui secara lebih luas oleh publik.

#### **3. Efisiensi dan Efektivitas**

Efisiensi dan efektivitas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Dalam pengelolaan aset PT. KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, efisiensi dan efektivitas terlihat dari upaya perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasional serta meningkatkan nilai ekonomi aset tersebut.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan seperti penggunaan aset yang belum optimal serta keterbatasan sistem informasi manajemen aset. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan sistem pengelolaan aset agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi organisasi.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pemanfaatan aset pada PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara telah dilaksanakan melalui beberapa indikator, yaitu kesesuaian dengan peraturan, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas. Dari indikator kesesuaian dengan peraturan, pengelolaan dan pemanfaatan aset telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pada indikator transparansi, organisasi telah berupaya memberikan keterbukaan informasi terkait pemanfaatan aset kepada pihak yang berkepentingan. Sementara itu, dari indikator efisiensi dan efektivitas, pemanfaatan aset yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi perusahaan. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemanfaatan aset menjadi hal penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*.
- [2] Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [3] Hariyono, H. (2007). *Manajemen Aset*. Yogyakarta: Andi.
- [4] Hastings, N. (2010). *Physical Asset Management*. London: Springer.
- [5] Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- [6] Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [8] Nicholas, A. J. (2010). *Asset management: Theory and practice*. Wiley.
- [9] Raba, S. (2006). *Pengelolaan Akuntabilitas dalam Organisasi Publik*. Jakarta: Grasindo.
- [10] Ritzer, G. (2004). *Sociological Theory (6th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- [11] UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York.
- [12] World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's Experience*. Washington, DC: The World Bank.